



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180. 513. X TAHUN 2025**

TENTANG

DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2025

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Produsen Data perlu ditetapkan Daftar Data Prioritas Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas, serta memenuhi usulan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor : 500.14.4.2/4/sb/E/X/2025 Tanggal 3 Oktober 2025 Hal : Fasilitas Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu menetapkan Daftar Data Dan Data Prioritas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas;
  2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 656).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Data dan Data Prioritas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Data dan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, harus berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 17 Oktober 2025

 **BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**MUHAMMAD FIKRI**

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR DATA PRIORITAS KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
1	Dinas Ketahanan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Nasional update Tahun 2024	OPD Ybs
		2	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Update Bulan April 2025	OPD Ybs
		3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Update Tahun 2024	OPD Ybs
		4	Jumlah Stok Komoditas Pangan Update Desember (Angka November) 2024	OPD Ybs
		5	Angka Ketersediaan Protein per Kapita Update Tahun 2024	OPD Ybs
2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6	Persentase Jumlah Usaha Kecil Menengah	OPD Ybs
3	Dinas Kesehatan	7	Persentase Cakupan Desa/kelurahan UCI	OPD Ybs
		8	Angka kesakitan malaria	OPD Ybs
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Jumlah Inovasi Daerah	OPD Ybs
5	Dinas Pertanian dan Peternakan	10	Luas area tanaman perkebunan daerah Kabupaten Rejang Lebong	OPD Ybs



BUPATI REJANG LEBONG

MUHAMMAD FIKRI

DAFTAR DATA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
1	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
	Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	1	Nilai Awal pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	OPD Ybs ( Survei )
		2	Nilai Akhir pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	OPD Ybs ( Survei )
	Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	3	Jumlah Konflik yang ditangani	OPD Ybs
		4	Jumlah Konflik	OPD Ybs
2	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam satu tahun	OPD Ybs
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	6	Jumlah Pelanggaran Perda dalam 1 tahun	OPD Ybs
		7	Jumlah Perbup yang ditindak Pelanggaran	OPD Ybs
	Persentase Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	8	Jumlah Masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	OPD Ybs
		9	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	OPD Ybs
3	<b>Dinas Kesehatan</b>	10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	OPD Ybs

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JUMLAH DATA</b>	<b>DAFTAR DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		<b>11</b>	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	OPD Ybs
		<b>12</b>	Prevalensi Balita Stunting	OPD Ybs
		<b>13</b>	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI)	OPD Ybs
		<b>14</b>	Persentase puskesmas yg melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu	OPD Ybs
		<b>15</b>	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	OPD Ybs
		<b>16</b>	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	OPD Ybs
		<b>17</b>	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	OPD Ybs
		<b>18</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	OPD Ybs
		<b>19</b>	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
		<b>20</b>	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
		<b>21</b>	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
		<b>22</b>	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
		<b>23</b>	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
		<b>24</b>	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	OPD Ybs
		<b>25</b>	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	OPD Ybs
		<b>26</b>	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	OPD Ybs
		<b>27</b>	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	OPD Ybs
		<b>28</b>	Persentase Masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan	OPD Ybs
		<b>29</b>	Persentase Akreditasi Puskesmas minimal Utama	OPD Ybs
		<b>30</b>	Rasio puskesmas per satuan penduduk	OPD Ybs
		<b>31</b>	Rasio pustu per satuan penduduk	OPD Ybs
		<b>32</b>	Persentase puskesmas rawat inap	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		33	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Ybs
		34	Persentase Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	OPD Ybs
		35	Persentase PIRT yang bersertifikat	OPD Ybs
		36	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	OPD Ybs
		37	Persentase Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan	OPD Ybs
		38	Persentase keterisian data dalam aplikasi Kesehatan Pendekatan Keluarga (KPK)	OPD Ybs
		39	Angka Kematian Balita	OPD Ybs
		40	Kompilasi Data Imunisasi	OPD Ybs
		41	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	OPD Ybs
		42	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	OPD Ybs
		43	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan	OPD Ybs
		44	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	OPD Ybs
		45	Non Polio AFP rate	OPD Ybs
		46	Kompilasi data penyakit menular	OPD Ybs
		47	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	OPD Ybs
		48	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	OPD Ybs
		49	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	OPD Ybs
		50	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	OPD Ybs
		51	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	OPD Ybs
		52	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	OPD Ybs
		53	Penderita diare yang ditangani	OPD Ybs
		54	Angka kejadian malaria	OPD Ybs
		55	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		56	Rasio posyandu	OPD Ybs
		57	Cakupan kunjungan bayi	OPD Ybs
		58	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	OPD Ybs
		59	Cakupan pelayanan nifas	OPD Ybs
		60	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	OPD Ybs
		61	Cakupan pelayanan anak balita	OPD Ybs
		62	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	OPD Ybs
4	Rumah Sakit Umum Daerah	63	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	OPD Ybs
		64	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	OPD Ybs
		65	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	OPD Ybs
		66	Persentase tenaga kesehatan rumah sakit memiliki sertifikat kompetensi	OPD Ybs
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67	Indeks Kepuasan Masyarakat (daerah)	OPD Ybs
		68	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Ybs
		69	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Ybs
		70	Persentase peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	OPD Ybs
		71	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	OPD Ybs
		72	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	OPD Ybs
		73	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	OPD Ybs
		74	Rasio bayi berakte kelahiran	OPD Ybs
		75	Rasio pasangan berakte nikah	OPD Ybs
		76	Cakupan penerbitan akta kelahiran	OPD Ybs
		77	Persentase keluarga yang telah memiliki KK	OPD Ybs
		78	Persentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	OPD Ybs
		79	Persentase kepemilikan KIA usia kurang dari 17 tahun	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		80	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	OPD Ybs
		81	Jumlah pelaksanaan kerjasama (MoU) pemanfaatan data kependudukan	OPD Ybs
6	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	82	Persentase peningkatan desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima bina mental	OPD Ybs
		83	Persentase Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bina mental	OPD Ybs
		84	Cakupan Tokoh Agama Aktif	OPD Ybs
		85	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs
		86	Persentase Tokoh Agama aktif dan mendapatkan reward	OPD Ybs
		87	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs
		88	Persentase Perangkat Agama Yang Dibina	OPD Ybs
		89	Persentase Guru Agama Desa aktif	OPD Ybs
		90	Persentase tokoh agama teladan	OPD Ybs
		91	Persentase masyarakat berprestasi yang mendapatkan kesempatan perjalanan ibadah	OPD Ybs
		92	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs
7	<b>DP3APPKB</b>	93	Rasio KDRT	OPD Ybs
		94	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	OPD Ybs
		95	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	OPD Ybs
		96	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	OPD Ybs
		97	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	OPD Ybs
		98	Usia Harapan Hidup Perempuan	OPD Ybs
		99	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	OPD Ybs
		100	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	OPD Ybs
		101	Prevalensi kekerasan terhadap anak	OPD Ybs
		102	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	OPD Ybs
		103	Ratio Akseptor KB	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		104	Total Fertility Rate (TFR)	OPD Ybs
		105	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	OPD Ybs
		106	Partisipasi angkatan kerja perempuan	OPD Ybs
		107	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	OPD Ybs
		108	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	OPD Ybs
		109	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	OPD Ybs
		110	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	OPD Ybs
		111	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	OPD Ybs
		112	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	OPD Ybs
		113	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	OPD Ybs
		114	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan <i>Grand Design</i> Program Kependudukan	OPD Ybs
		115	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	OPD Ybs
		116	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	OPD Ybs
		117	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	OPD Ybs
		118	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	OPD Ybs
		119	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	OPD Ybs
		120	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		121	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	OPD Ybs
		122	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	OPD Ybs
		123	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	OPD Ybs
		124	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	OPD Ybs
8	Sekretariat DPRD	125	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	OPD Ybs
		126	Persentase fasilitasi pembahasan rancangan perda	OPD Ybs
		127	Persentase fasilitasi penetapan rancangan perda	OPD Ybs
		128	Persentase penjangkaran aspirasi yang efektif	OPD Ybs
		129	Jumlah rancangan Perda ditetapkan menjadi perda	OPD Ybs
		130	Jumlah kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	OPD Ybs
		131	Jumlah penerimaan kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 tahun	OPD Ybs
		132	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi pimpinan dan anggota DPRD	OPD Ybs
		133	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi ASN	OPD Ybs
		134	Jumlah Fasilitasi BANGGAR	OPD Ybs
		135	Jumlah penyerapan aspirasi masyarakat	OPD Ybs
		136	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif (pejabat Pemda) dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	OPD Ybs
9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	137	persentase koperasi aktif	OPD Ybs
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	138	Persentase UMKM yang aktif	OPD Ybs
		139	Persentase koperasi yang dibina	OPD Ybs
		140	Persentase UMKM yang dikembangkan	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		141	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	OPD Ybs
		142	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	OPD Ybs
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	143	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRE	OPD Ybs
		144	cakupan pasar yang baik	OPD Ybs
		145	Peningkatan rata-rata omset perdagangan	OPD Ybs
		146	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	OPD Ybs
		147	tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	OPD Ybs
		148	cakupan pengawasan terhadap komunitas barang	OPD Ybs
		149	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	OPD Ybs
		150	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipromosikan	OPD Ybs
		151	Persentase pertumbuhan pasar yang direvitalisasi	OPD Ybs
		152	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	OPD Ybs
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	153	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	OPD Ybs
		154	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM)	OPD Ybs
		155	Cakupan bina kelompok pengrajin	OPD Ybs
		156	Cakupan bina kelompok pengrajin	OPD Ybs
10	DPUPRPKP	157	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	OPD Ybs
		158	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	OPD Ybs
		159	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	OPD Ybs
		160	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	OPD Ybs
		161	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	OPD Ybs
		162	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	OPD Ybs
		163	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		164	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	OPD Ybs
		165	Persentase luas kawasan kumuh	OPD Ybs
		166	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	OPD Ybs
		167	Rasio rumah layak huni	OPD Ybs
		168	Indeks Infrastruktur Wilayah	OPD Ybs
		169	Rasio rumah layak huni	OPD Ybs
11	DISHUB	170	Rasio Elektrifikasi	OPD Ybs
		171	Persentase penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	OPD Ybs
		172	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten	OPD Ybs
12	BPBD	173	Indeks Risiko Bencana	
		174	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	OPD Ybs
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	175	APK PAUD	OPD Ybs
		176	APK SD/MI/Paket A	BPS / OPD
		177	APM SD/MI/Paket A	BPS / OPD
		178	APK SMP/MTs/Paket B	BPS / OPD
		179	APM SMP/MTs/Paket B	BPS / OPD
		180	angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3	OPD Ybs
		181	Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	OPD Ybs
		182	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	OPD Ybs
		183	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	OPD Ybs
		184	Persentase BMA Aktif	OPD Ybs
		185	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	OPD Ybs
		186	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	OPD Ybs
		187	Persentase Benda, Situs dan Kawasan yang terpelihara	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		188	Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	OPD Ybs
		189	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	OPD Ybs
		190	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	OPD Ybs
		191	Pendidikan Anak Usia Dini	OPD Ybs
		192	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket A - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket B"	OPD Ybs
		193	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikemban	OPD Ybs
		194	Persentase Keikutsertaaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	OPD Ybs
		195	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	OPD Ybs
		196	Persentase kesenian tradisional dan Lembaga adat yang dilestarikan	OPD Ybs
		197	Persentase sejarah lokal yang terdokumentasi	OPD Ybs
		198	Cakupan sejarah lokal yang didokumentasikan	OPD Ybs
14	BKPSDM	199	Indeks Profesionalitas ASN	OPD Ybs
		200	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	OPD Ybs
		201	Persentase Dokter yang Mendapat Bantuan Tugas Belajar	OPD Ybs
		202	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	OPD Ybs
		203	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	OPD Ybs
		204	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	OPD Ybs
		205	Persentase layanan ASN	OPD Ybs
		206	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	OPD Ybs
		207	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	OPD Ybs
		208	Persentase kualitas kedisiplinan Aparatur	OPD Ybs
		209	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		210	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural /fungsional	OPD Ybs
15	Dinas Pemuda dan olahraga	211	Persentase pemuda berdaya saing	OPD Ybs
		212	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Ybs
		213	Cakupan pembinaan olahraga	OPD Ybs
		214	Persentase Pemuda Berprestasi yang difasilitasi Persentase pemuda kader yang dibina Persentase Pemuda Pelopor yang dibina Persentase Pemuda Wirausaha yang dibina	OPD Ybs
		215	Cakupan Pemuda yang dibina	OPD Ybs
		216	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Ybs
		217	Cakupan pembinaan olahraga	OPD Ybs
		218	Persentase Pembibitan olahraga berbakat	OPD Ybs
		219	Cakupan Pembinaan Olahraga Berprestasi	OPD Ybs
		220	Persentase Pembibitan olahraga berbakat	OPD Ybs
		221	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga rekreasi	OPD Ybs
16	Hukum	222	Persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	OPD Ybs
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	223	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	OPD Ybs
		224	Persentase Kunjungan Perpustakaan	OPD Ybs
		225	Persentase Sarana dan nprasana perpustakaan daerah dalam keadaan baik	OPD Ybs
		226	Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	OPD Ybs
		227	Persentase Perpustakaan yang dibina	OPD Ybs
		228	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	OPD Ybs
		229	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	OPD Ybs
		230	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	OPD Ybs
		231	Persentase tindak lanjut temuan	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		232	1. Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reuiu, monitoring dan evaluasi 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	OPD Ybs
		233	Persentase Temuan hasil pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang ditangani	OPD Ybs
		234	Indeks Integritas Pemerintah	OPD Ybs
18	Dinas Lingkungan Hidup	235	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	OPD Ybs
		236	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	OPD Ybs
		237	Indeks Kualitas Air	OPD Ybs
		238	Indeks Kualitas Udara	OPD Ybs
		239	Indeks Tutupan Lahan	OPD Ybs
		240	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OPD Ybs
		241	Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Ybs
		242	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Ybs
		243	Persentase Peningkatan Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	OPD Ybs
		244	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Izin Lingkungan	OPD Ybs
		245	Peningkatan Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH yang terselesaikan	OPD Ybs
		246	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	OPD Ybs
		247	Timbulan sampah yang ditangani (Persentase Pengelolaan persampahan)	OPD Ybs
		248	Cakupan area pelayanan pengelolaan persampahan	OPD Ybs
		249	Jumlah Kecamatan yang masuk dalam area pelayanan pengelolaan persampahan	OPD Ybs
19	Dinas Kominfo	250	Indeks SPBE	OPD Ybs
		251	Nilai survey kepuasan Informasi komunikasi publik	OPD Ybs
		252	Indeks Layanan SPBE	OPD Ybs
		253	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		254	Cakupan layanan telekomunikasi (Jumlah titik blankspot)	OPD Ybs
		255	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	OPD Ybs
		256	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Persentase Anggota Rumah Tangga diatas Usia 5 Tahun yang Mengakses Internet)	OPD Ybs
		257	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	OPD Ybs
		258	Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online	OPD Ybs
		259	Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan Secara Online	OPD Ybs
		260	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	OPD Ybs
		261	Persentase Ketersediaan data Yang akurat, Mutakhir, terpadu dan Akuntabel serta mudah di bagi pakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	OPD Ybs
20	Dinas Pemadam Kebakaran	262	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	OPD Ybs
		263	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	OPD Ybs
		264	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran dalam satu tahun	OPD Ybs
		265	Jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang diberdayakan	OPD Ybs
21	Bagian Pembangunan	266	Persentase Realisasi APBD	OPD Ybs
22	Bagian Pemerintahan	267	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas LPPD	OPD Ybs
		268	Jumlah Kerjasama Pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	OPD Ybs
		269	Jumlah Dokumen Batas Wilayah Kelurahan/Desa yang telah selesai tata batas dan wilayah	OPD Ybs
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	270	Indeks Ketahanan Pangan	OPD Ybs
		271	Skor Pola Pangan Harapan	OPD Ybs
		272	Ketersediaan Pangan Utama	OPD Ybs
		273	Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi	OPD Ybs
		274	Penguatan Cadangan Pangan	OPD Ybs
		275	Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		<b>276</b>	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	OPD Ybs
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari	<b>277</b>	- Energi	OPD Ybs
		<b>278</b>	- Protein	OPD Ybs
	Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari	<b>279</b>	- Energi	OPD Ybs
		<b>280</b>	- Protein	OPD Ybs
	Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari	<b>281</b>	- Energi	OPD Ybs
		<b>282</b>	- Protein	OPD Ybs
		<b>283</b>	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	OPD Ybs
		<b>284</b>	Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun (Desa)	OPD Ybs
		<b>285</b>	Jumlah Desa/Kawasan Mandiri Pangan yang dibina/dikembangkan (desa)	OPD Ybs
		<b>286</b>	Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (desa)	OPD Ybs
		<b>287</b>	Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (desa)	OPD Ybs
<b>24</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>288</b>	Persentase Jaringan Irigasi Tersier wewenang Kabupaten dalam Kondisi Baik	OPD Ybs
		<b>289</b>	Persentase Jalan Sentra Produksi dalam Kondisi Baik	OPD Ybs
		<b>290</b>	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (ADHK)	OPD Ybs
		<b>291</b>	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	OPD Ybs
		<b>292</b>	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	OPD Ybs
		<b>293</b>	Persentase Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	OPD Ybs
		<b>294</b>	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ternak	OPD Ybs
		<b>295</b>	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Ybs
		<b>296</b>	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	OPD Ybs
		<b>297</b>	Persentase Kelompok Tani Aktif	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		<b>298</b>	Produksi Komoditas Makanan Utama (Padi)	OPD Ybs
		<b>299</b>	Produksi Komoditas Palawija	OPD Ybs
		<b>300</b>	Produksi Komoditas Hortikultura Sayuran	OPD Ybs
		<b>301</b>	Produksi Komoditas Hortikultura Buah	OPD Ybs
		<b>302</b>	Produksi Kopi Robusta	OPD Ybs
		<b>303</b>	Produksi Kopi Arabica	OPD Ybs
		<b>304</b>	Produksi Aren	OPD Ybs
		<b>305</b>	Produksi Daging Ternak	OPD Ybs
		<b>306</b>	Produksi Telur	OPD Ybs
		<b>307</b>	Produksi Susu	OPD Ybs
		<b>308</b>	Produksi Perikanan Budidaya	OPD Ybs
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per hektar	<b>309</b>	- Produktivitas Tanaman Padi	OPD Ybs
		<b>310</b>	- Produktivitas Tanaman Hortikultura Sayuran	OPD Ybs
		<b>311</b>	Persentase Kelompok Tani yang dibina BPP	OPD Ybs
		<b>312</b>	Jumlah Kelompok Petani yang dibina BPP	OPD Ybs
<b>25</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>313</b>	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	OPD Ybs
		<b>314</b>	Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	OPD Ybs
		<b>315</b>	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai	OPD Ybs
		<b>316</b>	Persentase rumah tangga yang mendapatkan program keluarga harapan	OPD Ybs
		<b>317</b>	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	OPD Ybs
		<b>318</b>	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	OPD Ybs
		<b>319</b>	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	OPD Ybs
		<b>320</b>	Persentase Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis diluar panti	OPD Ybs

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JUMLAH DATA</b>	<b>DAFTAR DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		<b>321</b>	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di Verifikasi dan validasi	OPD Ybs
		<b>322</b>	Persentase Layanan Penanganan korban bencana selama tanggap darurat	OPD Ybs
		<b>323</b>	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	OPD Ybs
		<b>324</b>	Persentase PMKS yang tertangani	OPD Ybs
		<b>325</b>	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	OPD Ybs
		<b>326</b>	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	OPD Ybs
		<b>327</b>	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	OPD Ybs
<b>26</b>	<b>Dinas Tenaga dan Transmigrasi</b>	<b>328</b>	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	OPD Ybs
		<b>329</b>	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	OPD Ybs
		<b>330</b>	Angka sengketa pengusaha-pekerja	OPD Ybs
		<b>331</b>	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	OPD Ybs
		<b>332</b>	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	OPD Ybs
		<b>333</b>	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	OPD Ybs
		<b>334</b>	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	OPD Ybs
		<b>335</b>	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	OPD Ybs
<b>27</b>	<b>Dinas PMD</b>	<b>336</b>	Indeks Desa Membangun (IDM)	OPD Ybs
		<b>337</b>	Persentase BUMDesa yang berkembang atau maju	OPD Ybs
		<b>338</b>	Persentase masyarakat usia produktif yang diberdayakan	OPD Ybs
		<b>339</b>	Persentase Perubahan status desa, terutama status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	OPD Ybs
		<b>340</b>	Persentase Desa Tertib Administrasi	OPD Ybs
		<b>341</b>	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		342	Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat	OPD Ybs
		343	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat aktif	OPD Ybs
		344	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	OPD Ybs
		345	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	OPD Ybs
		346	Persentase PKK aktif	OPD Ybs
		347	Persentase posyandu aktif	OPD Ybs
		348	Persentase peningkatan kapasitas aparat desa	OPD Ybs
		349	Jumlah Desa Tertinggal	OPD Ybs
		350	Jumlah Desa Mandiri	OPD Ybs
28	Dinas Pariwisata	351	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	OPD Ybs
		352	Rata-rata Lama Tinggal	OPD Ybs
		353	Tingkat Hunian Hotel	OPD Ybs
		354	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	OPD Ybs
		355	Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara	OPD Ybs
		356	<i>Event</i> pariwisata yang diselenggarakan	OPD Ybs
		357	Persentase Media Promosi Pariwisata	OPD Ybs
		358	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	OPD Ybs
		359	Persentase peningkatan wisatawan	OPD Ybs
		360	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	OPD Ybs
		361	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	OPD Ybs
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	362	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	OPD Ybs
		363	persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	OPD Ybs
		364	Dokumen perencanaan RPJPD yang telah di tetapkan dengan PERDA	OPD Ybs
		365	Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		366	Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	OPD Ybs
		367	nilai sakip komponen Perencanaan Kinerja	OPD Ybs
		368	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	OPD Ybs
		369	nilai indeks Inovasi daerah	OPD Ybs
		370	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	OPD Ybs
		371	persentase implementasi rencana kelitbangan	OPD Ybs
		372	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	OPD Ybs
		373	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	OPD Ybs
		374	persentase lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	OPD Ybs
		375	persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	OPD Ybs
30	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	376	persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu	OPD Ybs
		377	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	OPD Ybs
		378	Persentase Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan	OPD Ybs
		379	persentase aset daerah yang diamankan , di tertibkan dan dimanfaatkan	OPD Ybs
31	<b>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</b>	380	Tingkat Inflasi	OPD Ybs
32	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	381	Nilai investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)	OPD Ybs
		382	Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	OPD Ybs
		383	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	OPD Ybs
		384	persentase Kegiatan promosi penanaman modal	OPD Ybs
		385	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di kabupaten	OPD Ybs
		386	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan terpadu satu pintu	OPD Ybs

NO	INSTANSI	JUMLAH DATA	DAFTAR DATA	SUMBER DATA
		387	Persentase Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang tertib dan teratur	OPD Ybs
		388	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah )	OPD Ybs



BUPATI REJANG LEBONG

MUHAMMAD FIKRI